

Kemiskinan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial: Konsep, Faktor Penyebab, Dan Upaya Penanggulangannya

Sukmasari¹, ST. Shara Hudzaifah², Sri Rahmayunita³

¹*Kesejahteraan Sosial, Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Indonesia*
sukmasari963@gmail.com, stshar762@gmail.com sriahmayunita546@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial, faktor-faktor penyebabnya, serta strategi penanggulangannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang bersumber dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan ketimpangan pembangunan. Kemiskinan berdampak pada menurunnya kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat serta menghambat tercapainya kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kebijakan pemerintah, program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peran pekerja sosial dan lembaga sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Kemiskinan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial, bantuan sosial.

Poverty In The Perspective Of Social Welfare: Concepts, Causes, And Efforts To Overcome It

Sukmasari¹, ST. Shara Hudzaifah², Sri Rahmayunita³

¹*Social Welfare, Da'wah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Indonesia*
sukmasari963@gmail.com, stshar762@gmail.com srirahmayunita546@gmail.com

Abstract: Poverty is a multidimensional social problem that is not only related to low income but also to limited access to education, healthcare, employment, and social services. This study aims to examine poverty from the perspective of social welfare, identify its contributing factors, and analyze poverty alleviation strategies in Indonesia. The study employs a qualitative method using a literature review approach, drawing data from books, journal articles, legislation, and official government publications. The findings indicate that poverty is influenced by various factors, including low human resource quality, limited employment opportunities, and unequal development. Poverty negatively affects the quality of life of individuals, families, and communities, thereby hindering the achievement of social welfare. Poverty alleviation efforts are carried out through government policies, social assistance programs, community empowerment, and the active involvement of social workers and social institutions. Therefore, collaboration among all stakeholders is essential to ensure that poverty reduction programs are effective, well-targeted, and sustainable in achieving social welfare.

.Keywords: Poverty, social welfare, community empowerment, social workers, social assistance.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu isu sosial yang hingga saat ini tetap menjadi tantangan utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kondisi kemiskinan tidak hanya terlihat dari pendapatan yang rendah, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi serta layanan publik. Dengan demikian, kemiskinan dianggap sebagai masalah yang memiliki banyak dimensi dan mempengaruhi beragam aspek kehidupan baik individu maupun masyarakat. Keberadaan kemiskinan berdampak pada penurunan kualitas hidup, menurunnya produktivitas masyarakat, serta peningkatan kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan di tingkat nasional.

Dalam sudut pandang kesejahteraan sosial, kemiskinan dilihat sebagai keadaan yang menghalangi individu, keluarga, atau komunitas dalam mencapai fungsionalitas sosial secara maksimal. Konsep kesejahteraan sosial tidak hanya

fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial, melainkan juga meliputi hak-hak sosial yang terpenuhi, kesempatan yang setara, keadilan sosial, dan kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu petunjuk bahwa kesejahteraan sosial belum tercapai, mengingat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pada pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya mengatasi kemiskinan perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, sambil mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, serta institusi.

Beragam penelitian dalam literatur mengungkapkan bahwa penyebab kemiskinan itu rumit dan saling berhubungan. Faktor internal seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterampilan, produktivitas, dan mutu sumber daya manusia, berkolaborasi dengan faktor eksternal yang meliputi terbatasnya peluang kerja, ketidakadilan distribusi pendapatan, pertumbuhan populasi, akses terhadap modal, serta kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mendukung kelompok yang rentan. Selanjutnya, dinamika ekonomi global, perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, bencana alam, serta krisis ekonomi juga dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat mengalami kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai studi menekankan bahwa kemiskinan tidak bisa dipahami hanya melalui satu faktor, melainkan merupakan akibat dari interaksi berbagai dimensi yang saling memengaruhi.

Beragam cara untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan lewat kebijakan perlindungan sosial, dukungan finansial, pemberdayaan masyarakat, perbaikan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha ekonomi yang produktif. Meski begitu, hasil dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari program-program tersebut masih memiliki banyak tantangan, seperti ketidaksesuaian dalam penargetan, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga, rendahnya partisipasi dari masyarakat, dan belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu. Dalam konteks kesejahteraan sosial, penanganan kemiskinan tidak hanya harus dilakukan dengan memberikan bantuan jangka pendek, melainkan juga membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas individu, keluarga, dan komunitas untuk mencapai kemandirian sosial serta ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur, yang merupakan metode riset yang dilakukan melalui pengumpulan, analisis, penilaian, dan penggabungan berbagai sumber akademis, seperti buku, artikel dari jurnal baik nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang evolusi konsep kemiskinan, faktor-faktor yang menyebabkannya, serta berbagai strategi penanganan kemiskinan yang telah dihasilkan oleh riset sebelumnya. Pendekatan kajian literatur dipilih karena memberikan gambaran yang terstruktur mengenai perkembangan pengetahuan serta membantu dalam menemukan kesamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pentingnya studi tentang Kemiskinan dalam Lensa Kesejahteraan Sosial: Definisi, Penyebab, dan Solusi untuk Mengatasinya perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi kemiskinan dari sudut pandang kesejahteraan sosial, mengenali berbagai elemen yang berkontribusi pada munculnya kemiskinan, serta menganalisis berbagai pendekatan penanganan yang telah diterapkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan bidang ilmu kesejahteraan sosial, menambah wawasan akademis mengenai isu kemiskinan, serta menjadi acuan bagi pemerintah, peneliti, pekerja sosial, dan pihak terkait dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif, inklusif, dan berkesinambungan untuk mengurangi kemiskinan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu kajian ilmiah karena memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan kajian pada topik yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

No	Judul Artikel	Penulis	Fokus Utama
1.	Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan: Analisis Literatur Sistematis terhadap Perspektif Ekonomi dan Sosial	Inka Nusamuda Pratama, Ajai Saputra, & Sigit Karma Syaputra (2025)	Menganalisis kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui Systematic Literature Review (SLR) untuk menjelaskan penyebab, dinamika, dan dampak kemiskinan dari perspektif ekonomi dan sosial.
2.	Kemiskinan di Wilayah Pesisir: Penyebab dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal	Ramadi dkk. (2024)	Mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir, dampak sosial-ekonomi, serta alternatif penanggulangan berdasarkan hasil kajian literatur.
3.	Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis atas Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil	Utami dkk. (2026)	Menganalisis hasil penelitian terdahulu mengenai kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Systematic Literature Review .

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian menggunakan metode studi literatur atau *Systematic Literature Review* untuk mengkaji berbagai aspek kemiskinan. Persamaannya terletak pada penggunaan metode studi literatur, sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas kemiskinan secara lebih komprehensif dari perspektif kesejahteraan sosial, mencakup konsep, faktor penyebab, hubungan dengan kesejahteraan sosial, serta upaya penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai isu kemiskinan..

Konsep Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat dipenuhi sehingga individu dapat menjalani hidup dengan layak, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Dalam kerangka pembangunan nasional, kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga melibatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, lingkungan yang aman, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Dalam konteks kesejahteraan sosial di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi untuk memungkinkan mereka hidup dengan layak serta dapat mengembangkan diri, sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Oleh sebab itu, kesejahteraan sosial dianggap sebagai hasil kolaborasi antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan penyediaan layanan sosial yang adil. Evolusi penelitian mengenai kesejahteraan sosial di Indonesia juga memperlihatkan bahwa konsep ini semakin menekankan pada peningkatan kualitas hidup, penguatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas baik individu maupun komunitas untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk mengembalikan fungsi yang baik pada setiap individu, kelompok, dan komunitas dalam menjalani kehidupannya. Schneiderman menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti memenuhi standar dasar hidup seperti kebutuhan sandang, perumahan, makanan, kesehatan, dan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan;
- b). Mencapai penyesuaian diri yang positif, khususnya dengan komunitas di sekitarnya;
- c). Meningkatkan kualitas hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial memiliki peran dalam pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan penguatan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Peran pencegahan berfokus untuk menghentikan munculnya berbagai isu sosial dengan menyediakan layanan sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat. Peran penyembuhan dan pemulihan dilakukan untuk mendukung individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial agar bisa kembali menjalankan fungsi sosial mereka dengan baik. Di sisi lain, peran penguatan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat lewat peningkatan kapasitas, pengembangan potensi, dan perluasan akses terhadap sumber daya pembangunan. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial bukan hanya berfungsi sebagai sistem dukungan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Berbagai ahli memberikan penekanan yang berbeda mengenai konsep kesejahteraan sosial, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Durhan Kesejahteraan Sosial dapat dipahami sebagai suatu usaha terencana untuk meningkatkan kualitas hidup sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti keluarga, anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, tingkat kehidupan, interaksi sosial, dan banyak aspek lainnya. Layanan-layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial tersebut berfokus pada perhatian terhadap individu, kelompok, komunitas, serta masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Wicheden kesejahteraan sosial adalah Sebuah sistem regulasi yang mencakup program, keuntungan, dan layanan yang memperbaiki atau memastikan penyediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diakui sebagai fondasi populasi dan ketertiban sosial. Sedangkan Menurut Suparlan kesejahteraan sosial adalah Keberadaan yang harmonis secara umum, yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Ini tidak terbatas pada perbaikan dan penghapusan masalah sosial tertentu, namun merupakan suatu kondisi dan aksi. Kesejahteraan sosial merupakan suatu institusi yang menawarkan layanan sosial kepada komunitas untuk mencapai

kualitas hidup yang lebih baik dengan cara memperkuat potensi individu atau kelompok melalui penyelesaian permasalahan serta pemenuhan kebutuhan mereka.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana individu, keluarga, atau kelompok sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan fungsi sosial mereka. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi penghasilan, tetapi juga meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang memadai, tempat tinggal, serta layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, kemiskinan dipahami sebagai fenomena yang bersifat multidimensional yang terpengaruh oleh aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Pendekatan multidimensional menunjukkan bahwa seseorang bisa dianggap miskin meskipun pendapatannya lebih tinggi dari garis kemiskinan jika mereka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan dasar dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

John Maynard Keynes (1936) menyatakan bahwa isu kemiskinan muncul berasal dari sebuah paradoks ekonomi yang disebut "kemiskinan di tengah kelimpahan", yang menunjukkan keadaan di mana kemiskinan terjadi meskipun ada banyak sumber daya. Dalam pandangannya, Keynes memperhatikan bahwa ada ketidakstabilan yang berasal dari dalam sistem dan melihat bahwa peranan fungsi tenaga kerja dan pasar modal yang tidak terikat menciptakan kecenderungan kuat untuk keseimbangan pasar. Penekanan Keynes mengenai kelemahan sistem dalam melakukan penyesuaian secara otomatis menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara apa yang masyarakat konsumsi dan apa yang diproduksi untuk memenuhi permintaan, sehingga menghasilkan ketimpangan yang memperburuk keadaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Adapun jenis-jenis kemiskinan diantaranya:



Gambar 1

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang diterima oleh masyarakat berada di bawah batas kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan standar hidup.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan kemiskinan yang timbul akibat kebijakan yang belum bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat atau wilayah, sehingga menciptakan ketidaksetaraan di tengah komunitas. Biasanya, wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh sistem yang ada adalah pedesaan yang berada di daerah terpencil, sehingga sering kali wilayah tersebut dikenal sebagai daerah yang terbelakang dan kurang berkembang. Fenomena kemiskinan ini sering kali berkaitan dengan faktor waktu dan lokasi, yang mengakibatkan variasi antara setiap tempat.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berkaitan dengan pola pikir, nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan kualitas sumber daya manusia yang menghambat seseorang untuk keluar dari kondisi miskin. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan, kurangnya motivasi untuk berkembang, serta budaya yang kurang mendukung perubahan menjadi faktor utama penyebab kemiskinan jenis ini. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan kultural tidak hanya diatasi melalui bantuan ekonomi, tetapi juga melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan pola pikir agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi karena adanya ketimpangan dalam sistem sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang menyebabkan sebagian masyarakat sulit memperoleh akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, distribusi pembangunan yang tidak merata, kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, dan lemahnya perlindungan sosial menjadi penyebab utama kemiskinan struktural. Dalam kondisi ini, masyarakat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bukan semata-mata karena kemampuan individu, tetapi karena adanya hambatan dari struktur sosial yang membatasi kesempatan mereka untuk berkembang.

e) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam atau lingkungan geografis yang kurang mendukung. Misalnya, daerah yang sering mengalami bencana alam, kekeringan, banjir, tanah yang kurang subur, atau wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menghambat aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatan menjadi rendah dan kesempatan memperoleh pelayanan dasar juga terbatas. Penanggulangan kemiskinan alamiah memerlukan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan terhadap bencana, pengembangan teknologi pertanian, serta pemerataan pembangunan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan berbagai parameter yang menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, beberapa indikator yang sering dipakai antara lain adalah tingkat penghasilan, belanja perindividu, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kondisi tempat tinggal, peluang kerja, dan kepemilikan barang. Seiring dengan perkembangan studi tentang kemiskinan, indikator tersebut semakin diperluas dengan memperhatikan dimensi sosial, misalnya akses terhadap teknologi informasi, jaminan sosial, serta kualitas lingkungan. Pendekatan yang bersifat multidimensional memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi masyarakat yang kurang mampu jika dibandingkan dengan pengukuran yang hanya berfokus pada batas kemiskinan.

Kemiskinan adalah hasil dari interaksi berbagai elemen yang saling berkaitan, baik yang berasal dari individu maupun dari lingkungan sosial. Aspek internal mencakup rendahnya pendidikan, keterampilan, produktivitas tenaga kerja, kondisi kesehatan, serta keterbatasan dalam kepemilikan aset. Di sisi lain, aspek eksternal meliputi

minimnya peluang kerja, ketidakmerataan dalam pembangunan antar wilayah, akses yang rendah terhadap teknologi, perubahan dalam struktur ekonomi, serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya mendukung kelompok-kelompok yang rentan. Perubahan kondisi ekonomi global, munculnya pandemi, dan kemajuan teknologi juga berkontribusi dalam mempengaruhi dinamika kemiskinan di Indonesia.

Hubungan Kemiskinan dengan kesejahteraan sosial

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial adalah dua gagasan yang sangat terkait satu sama lain dalam pembahasan ilmu kesejahteraan sosial. Kemiskinan bukan hanya diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai kondisi yang menghambat akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup dengan layak. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka bisa menjalankan peran sosialnya dengan baik. Jadi, semakin banyak orang yang miskin di sebuah masyarakat, semakin sulit mencapai kebahagiaan sosial tersebut.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, kemiskinan dianggap sebagai permasalahan sosial yang memiliki banyak aspek. Kemiskinan bukan hanya terlihat dari penghasilan yang rendah, tetapi juga dari kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, rumah yang layak, perlindungan sosial, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut membuat individu dan keluarga menghadapi berbagai jenis kerentanan yang bisa merusak kualitas hidup dan menghalangi pertumbuhan sosial serta ekonomi.

Hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan sosial bisa dilihat dari sejauh mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kesejahteraan sosial hanya bisa tercapai jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan layanan publik yang cukup, serta terlibat dalam kehidupan sosial. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga berisiko terisolasi secara sosial, bergantung pada bantuan ekonomi, dan memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah.

Selain memengaruhi individu, kemiskinan juga berdampak pada kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Di tingkat keluarga, kemiskinan bisa membuat kualitas pendidikan anak menjadi buruk, kondisi kesehatan anggota keluarga memburuk, terjadinya konflik dalam keluarga, serta munculnya masalah dalam pengasuhan

anak. Di tingkat masyarakat, jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat memperlebar perbedaan sosial, meningkatkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tindakan kriminal, serta menghambat perkembangan sosial secara keseluruhan. Sebab itu, kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga jadi kendala besar dalam mencapai kebahagiaan sosial yang luas.

Dalam bidang pekerjaan sosial, hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan sosial dipahami berdasarkan konsep *person-in-environment*, yaitu bahwa kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan di sekitarnya. Kemiskinan bisa terjadi karena kekurangan kemampuan seseorang, atau karena faktor-faktor struktural seperti ketidakseimbangan dalam penyebaran sumber daya, kurangnya peluang kerja, rendahnya kualitas pendidikan, serta tidak kuatnya sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga memerlukan upaya yang mampu meningkatkan kemampuan individu, memperluas akses terhadap layanan sosial, serta memperbaiki sistem sosial yang menyebabkan kemiskinan.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial secara mendalam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan berupaya mengungkap makna, konsep, serta hubungan antarfenomena melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dinilai sesuai untuk mengkaji kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial karena memungkinkan peneliti menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan empiris secara mendalam tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data dikumpulkan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, serta perkembangan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh dari berbagai sumber pustaka utama yang secara langsung membahas kemiskinan dan kesejahteraan sosial, seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kementerian terkait, publikasi organisasi internasional, prosiding seminar, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, serta mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, publikasi pemerintah, data statistik, serta dokumen resmi lainnya yang membahas konsep kemiskinan, kesejahteraan sosial, faktor penyebab kemiskinan, dan berbagai strategi penanggulangannya. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian sumber sehingga menghasilkan data yang valid untuk dianalisis.

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta menarik makna dari berbagai informasi yang terdapat dalam sumber pustaka secara sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.
2. Menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan fokus pembahasan, yaitu konsep kemiskinan, faktor penyebab, hubungan kemiskinan dengan kesejahteraan sosial, dan upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Menganalisis isi setiap sumber berdasarkan teori kesejahteraan sosial serta hasil penelitian terdahulu.
4. Menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
5. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup dengan baik, baik yang berkaitan dengan makanan maupun yang tidak. Di Indonesia, pengecekan tingkat kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per orang per bulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu batas pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Berdasarkan data terbaru dari BPS, di bulan Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total jumlah penduduk. Angka ini turun dibandingkan bulan September 2024 yang mencapai 8,57%. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial, pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan peluang kerja, dan upaya pemulihan ekonomi mulai berdampak baik dalam mengurangi jumlah orang yang miskin. Meski begitu, kemiskinan masih menjadi masalah besar karena penyebarannya tidak sama di setiap daerah.

Selain menghitung jumlah orang yang miskin, BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Kedua indikator ini membantu mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengeluaran penduduk miskin mencapai garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang ada di kalangan penduduk miskin. Data itu penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dengan lebih tepat sasaran.



Gambar 2

Secara umum, situasi kemiskinan di Indonesia mulai membaik setelah masa pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi yang sudah kembali seperti semula, bertambahnya pekerjaan, serta berbagai program perlindungan sosial membantu menurunkan angka orang miskin di Indonesia. Namun, kondisi ini belum merata sepenuhnya karena masih ada perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Pada bulan Maret 2025, persentase penduduk miskin di area perkotaan adalah sekitar 6,73%, sementara di daerah pedesaan mencapai 11,03%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi tantangan yang lebih sulit, seperti akses pendidikan yang terbatas, fasilitas kesehatan yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai, serta peluang kerja yang minim. Selain itu, beberapa provinsi di daerah timur Indonesia masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi kemiskinan dengan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan untuk pendidikan, subsidi kesehatan melalui BPJS, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur di desa. Upaya itu bukan hanya untuk mengurangi jumlah orang yang miskin, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan baru seperti kenaikan harga bahan makanan, perubahan iklim yang mengganggu sektor pertanian, ketidakstabilan ekonomi global, serta kualitas tenaga kerja yang masih rendah tetap bisa memperlambat penurunan jumlah penduduk miskin jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat.

Kemiskinan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan individu dan kelompok dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga, komunitas, bahkan pembangunan nasional.

Kemiskinan sebagai masalah sosial memberikan dampak yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas hidup karena kebutuhan dasar, seperti pangan bergizi, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak dapat dipenuhi secara optimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rendahnya status kesehatan, meningkatnya risiko penyakit, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Kemiskinan juga menjadi hambatan utama dalam mencapai kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial menekankan terpenuhinya kebutuhan dasar, terciptanya kesempatan yang setara, serta meningkatnya kualitas hidup seluruh warga negara. Individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai layanan publik sehingga sulit mengembangkan kemampuan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai kehidupan yang mandiri. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, tujuan pembangunan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, bermartabat, dan berfungsi sosial di dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas individu dan keluarga agar mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya. Peran pekerja sosial menjadi sangat penting dalam proses ini, yaitu sebagai fasilitator, advokat, pendamping, dan pemberdaya masyarakat agar kelompok miskin dapat memperoleh akses terhadap sumber daya serta meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi untuk mengatasi kemiskinan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan bersama oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai organisasi sosial, bertujuan mengurangi jumlah orang yang miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya berupa pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat agar bisa hidup mandiri secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan, perlu dilaksanakan strategi yang melibatkan kebijakan pemerintah, program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peran pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu masyarakat.

Salah satu cara penting adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan agar semua orang bisa merasakan kesejahteraan dengan adanya berbagai peraturan dan program pembangunan. Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan, seperti memberikan peluang kerja, membangun infrastruktur di daerah terpencil, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi nasional untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar program yang dilaksanakan lebih tepat mengenai sasarannya. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan cara ekonomi, tetapi juga melalui pengembangan manusia dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Sebagai langkah menerapkan kebijakan itu, pemerintah melaksanakan beberapa program bantuan sosial yang bertujuan untuk meringankan kesulitan hidup masyarakat yang kurang mampu. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), serta berbagai jenis subsidi termasuk dalam sistem perlindungan sosial nasional. Bantuan sosial bertujuan sebagai perlindungan sosial agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, bantuan sosial seharusnya tidak hanya memberikan kebutuhan pokok, tetapi juga harus dikombinasikan dengan program pemberdayaan agar orang yang menerima bantuan bisa meningkatkan penghasilan mereka dan keluar dari kemiskinan secara terus-menerus.

Strategi berikutnya adalah memperkuat masyarakat, yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa mengenali potensi yang mereka miliki, menggunakan sumber daya yang ada, serta terlibat aktif dalam pembangunan. Pendekatan pemberdayaan bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, membantu pengembangan usaha yang menghasilkan pendapatan, memudahkan akses ke modal usaha, memperkuat organisasi masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pekerjaan sosial, pemberdayaan dianggap sebagai cara yang lebih baik dan lebih tahan lama dibandingkan memberi bantuan yang hanya sementara, karena masyarakat diajak untuk menjadi pemain utama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

Dalam menerapkan strategi tersebut, pekerja sosial memainkan peran yang sangat penting sebagai fasilitator, pendamping, advokat, mediator, pendidik, dan pelaku pemberdayaan masyarakat. Pekerja sosial membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan yang mereka punya, menghubungkan mereka dengan berbagai layanan bantuan sosial, ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah, dan berjuang agar kelompok yang rentan bisa mendapatkan hak-haknya serta akses yang adil terhadap sumber daya. Selain itu, pekerja sosial juga membantu meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dengan memberikan konseling, memperkuat hubungan sosial, serta membangun kelompok masyarakat, agar mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri.

Selain pemerintah dan tenaga kerja sosial, lembaga-lembaga sosial juga memberikan peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Lembaga sosial,

baik yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yayasan, lembaga keagamaan, dan organisasi nonpemerintah, bertugas memberikan pelayanan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, bimbingan masyarakat, hingga mewakili kepentingan dalam hal kebijakan. Kerja sama antar lembaga sangat penting agar layanan yang diberikan tidak saling tumpang tindih dan bisa mencakup masyarakat yang kurang mampu secara lebih luas. Kerja sama antara pemerintah, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga sosial merupakan salah satu hal penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.¹

Analisis

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa keuntungan. Salah satu keunggulannya adalah adanya gabungan antara bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat, sehingga upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga telah menyusun sistem perlindungan sosial yang lebih terpadu melalui berbagai program bantuan yang mencakup kelompok rentan. Selain itu, peran pemerintah daerah, pekerja sosial, organisasi masyarakat, serta berbagai lembaga sosial memperkuat kerja sama dalam menjalankan program-program tersebut, sehingga upaya mengurangi kemiskinan menjadi lebih menyeluruh. Pendekatan kolaboratif ini sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial yang mengedepankan kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, masih ada beberapa masalah dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian tujuan penerima bantuan karena kualitas data yang belum benar-benar tepat, kurangnya kerja sama antar lembaga, serta masih banyak program yang bersifat jangka pendek dan lebih fokus pada pemberian bantuan daripada pengembangan kapasitas. Selain itu, di beberapa daerah, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum masih terbatas, sehingga masyarakat yang miskin sulit meningkatkan kualitas hidupnya meskipun sudah mendapatkan bantuan sosial.

¹ Gracenda and others, 'Peran Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, (2025), h. 110.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan membutuhkan kebijakan yang lebih baik, terus-menerus, dan sesuai dengan ciri khas setiap daerah.²

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, rekomendasi yang diberikan adalah memperkuat keakuratan data tentang masyarakat miskin agar program bantuan benar-benar tepat sasaran, meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pekerja sosial, dan organisasi sosial, serta memperluas program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Pemerintah juga harus meningkatkan pengeluaran untuk bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengadaan pekerjaan agar masyarakat bisa memiliki kemampuan sendiri untuk keluar dari keadaan miskin. Selain itu, evaluasi program harus dilakukan secara rutin agar bisa mengecek apakah kebijakan tersebut masih efektif, sementara itu, peran pekerja sosial perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah tenaga profesional dan meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya bisa mengurangi jumlah orang yang miskin, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial yang bisa terus berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Simpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, serta berbagai layanan sosial lainnya. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang menghambat individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ekonomi, melainkan sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui pendekatan kesejahteraan sosial.

Kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren yang terus mengalami penurunan, namun masih menjadi tantangan besar karena adanya kesenjangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Berbagai faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketimpangan

² Willya Achmad and others, 'Intervensi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat: Model Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kawasan Pesisir Selatan Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Nasional* (2026), h. 35.

pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta faktor struktural lainnya menjadi penyebab utama kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga, meningkatkan kesenjangan sosial, menurunkan kualitas hidup masyarakat, dan menghambat proses pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang terintegrasi melalui kebijakan pemerintah, program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antara pekerja sosial dan berbagai lembaga sosial. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya telah memberikan kontribusi dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan, penanggulangan kemiskinan yang efektif tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, pekerja sosial, lembaga sosial, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap program dapat berjalan secara tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri, adil, sejahtera, dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Achmad, Willy, Dhiya Nabilah Ramadhan, Boy Iskandar Warongan, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and others, 'Intervensi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat: Model Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kawasan Pesisir Selatan Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Nasional*, (2026)
- Andina, Wida, 'Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami', 09 (2024)

- Annasthasya, Dellia, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan', 2025,
- Darmalaksana, Wahyudin, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Ilmiah*, 1 (2020),
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Humanika*, 21 (2021),
- Fentiani, Siti Alifa, 'Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat', 2019 (2019),
- Gracenda, Br Purba, Dicky MC Sinulingga and Josua Togatorop, 'Peran Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2025
- Habibullah, 'Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai', 5 (2019)
- Hasanah, Waridatul, 'Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu', 4 (2023),
- Herdiana, Dian, 'Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa', 02 (2023),
- Jubaidah, Haifa Nur, 'Peran Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial', 4 (2025),
- Kholis, Nur, 'Kesejahteraan Sosial Di Indonesia'
- Pratama, Egi Yoga, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran)*, 2025
- Pratiwi, Salsabilla Aurelia, Cantika Noorsyarifa and Pusat Studi Csr, 'Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial', *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5 (2022)
- Ruja, I Nyoman, 'Kemiskinan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Model Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11 (2022),
- Safitri, Shelve Edna, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten', 1 (2020),
- Sitepu, Hemat, 'Kemiskinan Dan Kesejahteraan: Sebuah Kajian Konsep (Poverty and Welfare: A Study of the Concept)', 17 (2012),
- Sugeng Pujiharto, 'Identifikasi Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang', *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8 (2018),

- Sulistyowati, Fadjarini, 'Utopia Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 314 (2024),
- syahrida, 'Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin', *Manajemen*, 17 (2018),
- Syawie, Mochamad, 'Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial', *Jurnal Informasi*, 16 (2011),
- Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 6 (2020),
- Winarno, Istiana Hermawati dan Endro, 'Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020,